

KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MPRS DAN KETETAPAN MPR RI SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh : Rachmani Puspitadewi¹

ABSTRAK

Perubahan Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan dengan 4 tahap yaitu tahun 1999, 2000, 2001, 2002, telah membawa Indonesia ke beberapa perubahan besar. Perubahan tersebut diantaranya akibat dari penghapusan maupun pembentukan lembaga negara, pergeseran tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, susunan dan kedudukan lembaga negara. Salah satu perubahan mendasar, yang memiliki pengaruh terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia adalah pergeseran kedudukan, tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Pergeseran kedudukan MPR tersebut secara langsung mempengaruhi pula produk-produk peraturannya terutama Ketetapan MPR (TAP MPR). Oleh karena itu perlu kiranya untuk diketahui nasib kedudukan dari produk-produk dari MPR yang merupakan ketetapan dan keputusan setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Status hukum dan Kedudukan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1966-2002 dimuat dalam TAP MPR RI No. I / MPR / 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan TAP MPR tahun 1960-2002. Substansi TAP tersebut memberikan kepastian hukum bagi TAP MPRS/MPR yang masih berlaku, berlaku dengan syarat dan tidak berlaku.

Kata kunci : Ketetapan / TAP MPRS; Ketetapan / TAP MPR ; Keputusan MPR; Amandemen/ Perubahan UUD 1945.

1. PENDAHULUAN

Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) sebelum Amandemen UUD 1945 ditemukan dalam TAP MPRS RI No. XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Perundang-undangan yang kemudian dicabut dengan TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan kedua Ketetapan tersebut, TAP

MPRS dan TAP MPR berkedudukan dibawah UUD 1945 dan diatas Undang-Undang yang memiliki makna, bahwa TAP MPRS atau TAP MPR akan mengatur secara langsung pokok-pokok aturan dalam UUD 1945, sekaligus berkaitan langsung dengan penetapan haluan negara. Hal tersebut juga dapat dicermati diawal penyebutan TAP MPR, meskipun UUD 1945 naskah asli tidak mengenal istilah TAP MPR, istilah TAP MPR muncul dari sidang-

¹ Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahvanqan

